

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA PURBALINGGA
DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:
NUR ACHYA FAOZAN
NIM. 1522303025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Achya Faozan
NIM : 15223025
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA PURBALINGGA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Achya Faozan
NIM. 1522303025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN
MASYARAKAT PURBAYASA PURBALINGGA DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH
MALIYAH**

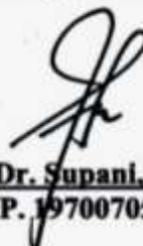
Yang disusun oleh Nur Achya Faozan (NIM. 1522303025) Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Penguji Utama


Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



8/9-2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nur Achya Faozan
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nur Achya Faozan
NIM : 15223025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA
PURBALINGGA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH
MALIYAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

MOTTO

“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kamu punya.
Lakukan yang kamu bisa”

(Arthur Ashe)

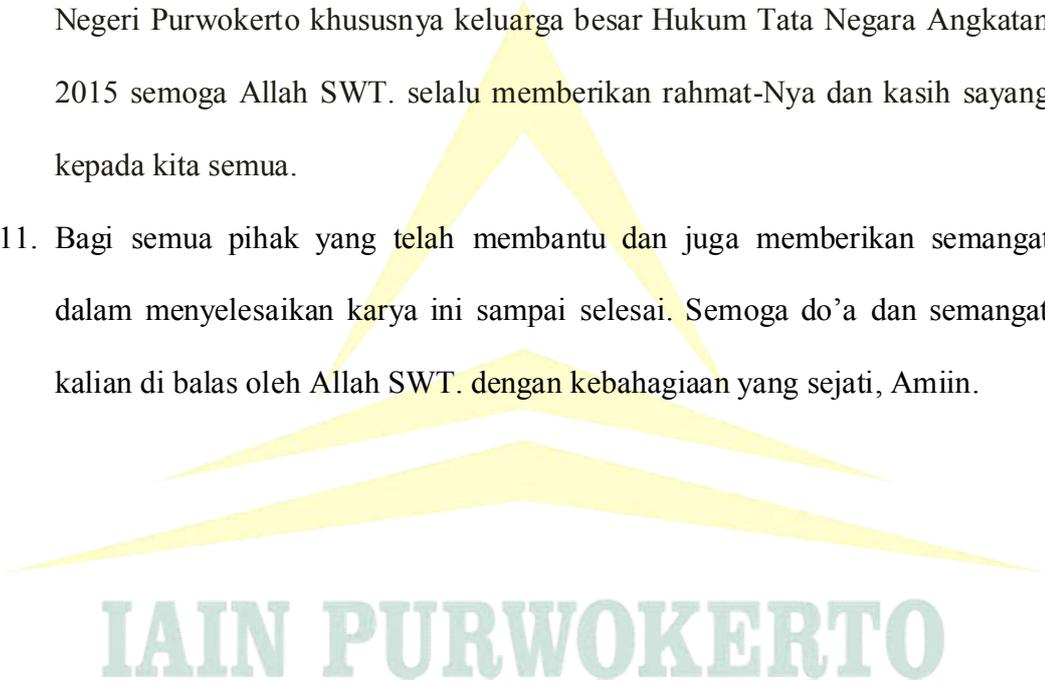


PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terimakasih yang saya dedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga saya yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
2. Abah Taufiqurrohman beserta keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu memberikan ilmu, do'a, dan yang selalu kami harapkan barokahnya.
3. Simbah Kyai H. Zaeni ilyas beserta Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda yang senantiasa kami harap-harapkan barokah ilmunya.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. Selaku pembimbing skripsi saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku, atas jasa kalian rasa hormatku.
10. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo, teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, dan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2015 semoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat-Nya dan kasih sayang kepada kita semua.
11. Bagi semua pihak yang telah membantu dan juga memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ini sampai selesai. Semoga do'a dan semangat kalian di balas oleh Allah SWT. dengan kebahagiaan yang sejati, Amiin.



IAIN PURWOKERTO

**Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
Gerakan Masyarakat Purbayasa Purbalingga
Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum Perspektif Siyash Maliyah**

ABSTRAK
Nur Achya Faozan
NIM: 1522303025

Mewujudkan kesejahteraan bukan hanya tugas seorang pemimpin, melainkan juga partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi perubahan sosial. Desa yang maju dapat di lihat dari kesejahteraan warga masyarakatnya. LSM dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui adanya program-program yang dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program-program yang bersifat partisipatif di desa Purbayasa dan bagaimana tinjauan fiqh siyash maliyah terhadap peran LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum di desa Purbayasa.

Jenis penenelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Peraturan Perundang-undangan, surat perjanjian, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat selanjutnya dianalisa secara sistematis sesuai pokok pembahasan. Data-data di analisis menggunakan analisis kualitatif melalui metode pendekatan yang bersifat *normatif-sosiologis* dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dalam menambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan juga deduktif yaitu cara berfikir mengambil kesimpulan data yang umum kepada kesimpulan yang khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran LSM Gempur dalam melaksanakan kegiatannya sebagai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah cukup bagus, terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, walaupun memang ada beberapa program-program yang belum terlaksana, namun LSM Gempur sudah memberikan perubahan yang lebih baik terhadap kehidupam masyarakat desa Purbayasa melalui program-program yang bersifat partisipatif. Dalam politik islam peran LSM yang di ibaratkan sebagai pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan dapat dikatakan sebagai pemimpin yang mampu menjalankan perannya dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan amanah dan kewajibannya sebagai pemimpin.

Kata Kunci: *LSM, Kesejahteraan Masyarakat, Pemimpin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: وَلَا - *wala* لَكَ - *laka*

لِفُلَانٍ - *lifulani* أَمْرًا - *amara*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: لَيْسَ - *laisa*

بَيْنَ - *baina*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* ذِي - *dzī*

كَانَ - *kāna* وَمَا - *wamā*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

حَتَّى - *hattā*

وَسَلَّمَ - *wa sallama*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السَّبِيل - *al-ssabili*

الْقُرْبَى - *al-qurbaa*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَطِيعُوا	<i>Adi'u</i>
Hamzah di tengah	وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>Syai'i</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ : *wa' budullāha walā tusyrikū bih*

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ : *wa mā malakats aymānukum*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

أَخْرِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ	<i>Akhrojnā lakum mina al-ard</i>
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ	<i>Wa atī'u allaha wa rasūluh</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana., M.S.I., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif maula., M.Ag., LL.M., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dody Nur Andriyan, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Muchimah S.H.I., M.H Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
9. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.
10. Segenap Perangkat Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
11. Segenap keluarga LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa.
12. Segenap informan yang telah memberikan informasi mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur.
13. Kedua orang tuaku Bapak Sujari dan Ibu Sukarti, serta kakak-kakakku yang yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
14. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Abah Taufiqurrohman beserta Keluarga besar terimakasih atas do'a dan bimbingannya selama penulis

bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto, serta segenap pengurus yang telah memberikan banyak pengalaman baru bagi penulis.

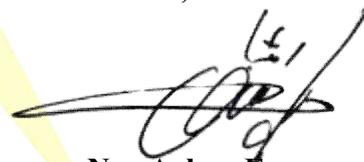
15. Semua ustadz/ah dan teman-teman saya, Pak Lurah, Mbah Atiq, Bang Roy, Bang Hud-Hud, Surur, Wafa, Almas Ngato, Ilham Rojaki, Pendi, Ngumar, Mukapid dan Fajri yang selalu menemani dan memotivasi untuk terus maju.
16. Sahabat Koperasi Anwar Maulidin, Majid Sensei, Ki Dalang Agus, Kamaludin Al Irsyadiyah, Zaenal Potret, dan Wahyudi Chiken, yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat kecil yang sudah tidak kecil lagi Adnan Ma'rifudin, Rizqi Arjuna, Erismanto, Trisna Sanubari, Abdul Jamil, Aji Purwono, Trisnanto, Novanda Dwi Saputra, Lutfi Mubarak yang selalu mendoakan dan memberi dukungan jarak jauh dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman KKN 42 kelompok 43 dan teman-teman PPL Banyumas 2019.
19. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.
20. Semua teman-teman dan adik-adik di Pondok Pesantren Darul Abror tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT. dan mendapat pahala dari-Nya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaana skripsi ini. Mudah –mudahan karya ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Amin.

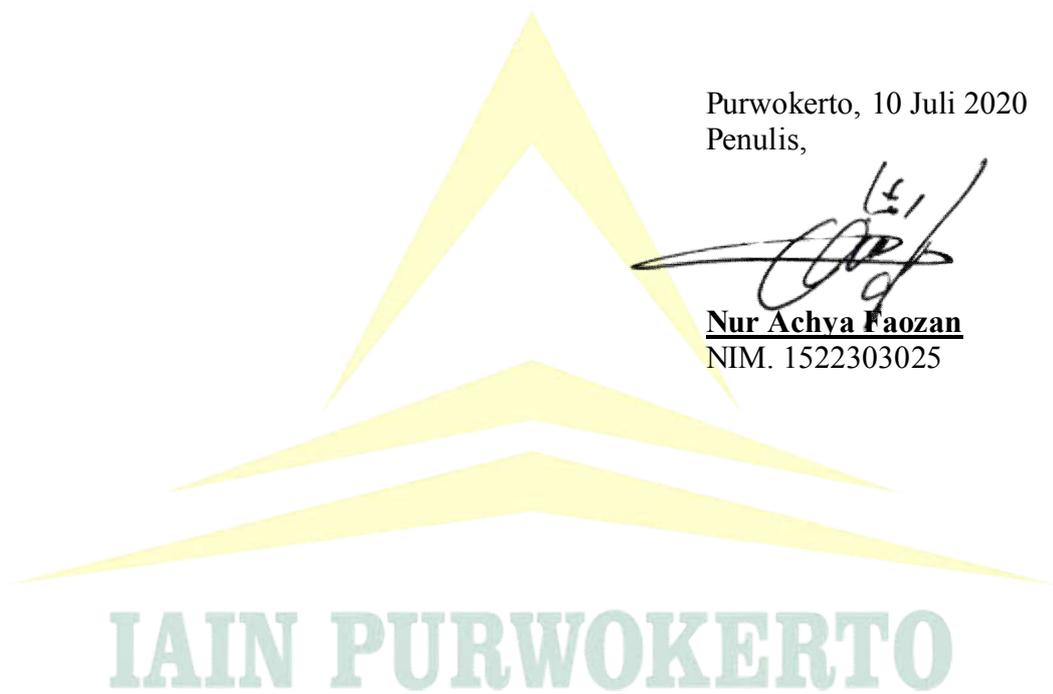
Purwokerto, 10 Juli 2020

Penulis,



Nur Achva Faozan

NIM. 1522303025



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Kerangka Teoritik	15
H. Sistematika Peembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT	
A. Peran	21
1. Pengertian Peran	22
2. Fungsi Peran	24
B. Lembaga Swadaya Masyarakat	25
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat	26
2. Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat	31
3. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat	33

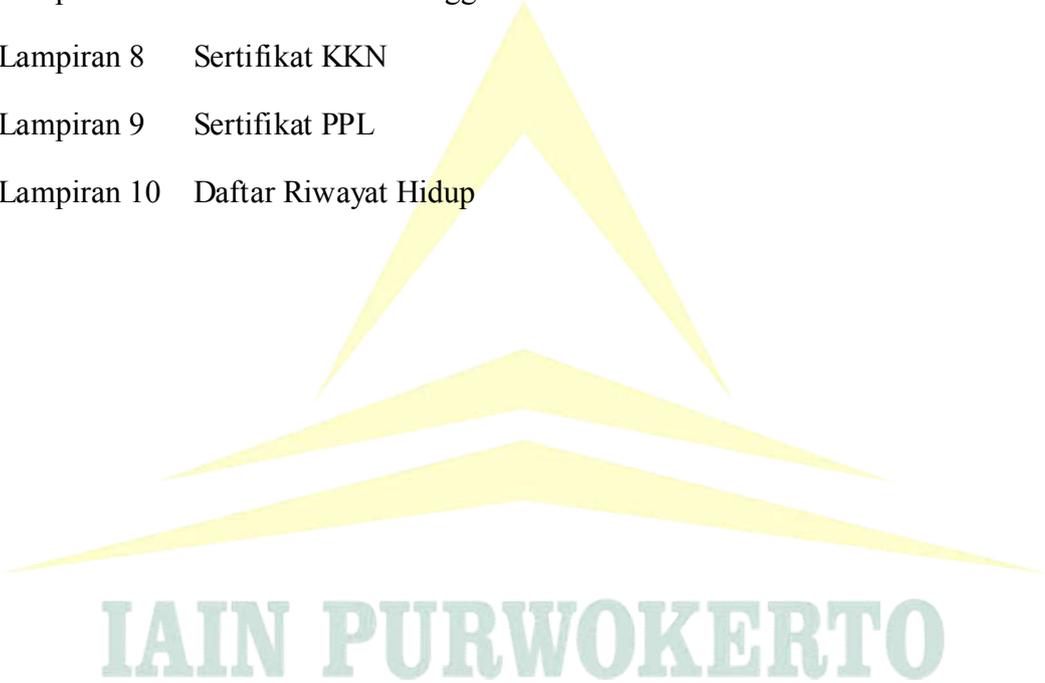
C.	Landasan Teori Kesejahteraan	35
1.	Pengertian Kesejahteraan	35
2.	Indikator Kesejahteraan.....	38
3.	Tujuan Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan.....	39
D.	Landasan Teori Siyasah Maliyah.....	41
1.	Pengertian Siyasah Maliyah.....	41
2.	Kedudukan Fiqh Maliyah Dalam Sistematika Hukum Islam.....	42
3.	Sumber Keuangan Negara.....	44
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	53
B.	Subjek dan Objek Penelitian	55
C.	Lokasi penelitian	55
D.	Sumber Data	55
E.	Metode Pengumpulan Data	57
F.	Metode Analisis Data.....	59
BAB IV	ANALISIS DATA PENELITIAN HASIL PENELITIAN TENTANG PERAN LSM GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH	
A.	Gambaran Umum LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa	63
B.	Peran LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umum.....	69
C.	Pandangan Siyasah Maliyah Terkait Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum.....	87
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 5 Sertifikat Lulus Ujian Akhir Komputer
- Lampiran 6 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 7 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Sertifikat PPL
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan segala aktivitasnya. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi perubahan sosial. Dimasa yang akan datang, masyarakat kita jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional akan semakin terkait erat dengan perkembangan internasional.¹

Gagasan *community development* (pengembangan masyarakat) muncul dalam diskursus keilmuan sebagai sebuah respons terhadap banyaknya masalah yang dihadapi umat manusia pada akhir abad ke 20. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*.²

Dalam paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

¹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 3.

² Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1 No. 2, Juli 2011, hlm. 88.

Demokrasi menitikberatkan persamaan diantara sesamanya, dan dalam praktek pemerintahan, demokrasi berintikan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban individual maupun institusional.³ Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dirasa perlu dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat serta memberdayakan mereka secara bersama-sama yang didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antar satu dengan yang lain.⁴

Kegiatan pengembangan masyarakat biasanya berlangsung dalam sebuah kelompok, satuan sosial atau organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada konteks ini, pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dan aksi sosial umumnya melibatkan warga masyarakat sebagai organisator secara mandiri dalam merencanakan, menjalankan, menentuka kebutuhan, dan memecahkan permasalahan individu maupun masyarakat.⁵

Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu (I) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensian dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 26.

⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1-2.

⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, hlm. 3.

darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum antara lain yaitu mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang biasa disebut LSM. Secara filosofis pengertian LSM secara tegas terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 Tahun 1990, tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.⁷

Ilmu politik juga membahas mengenai infrastruktur dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan suprastruktur politik adalah mesin

⁶ Yohanes Suhardin, "Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 3, September 2010, hlm. 390.

⁷ Yusdianto, "Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-Undang Keormasan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2012, hlm. 3

politik yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Dalam hal ini, LSM masuk dalam infrastruktur politik yang kinerjanya tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara.

Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan. Pembentukan ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.⁹

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konseptual, LSM yang berkarakteristik: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral, dan dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Karakteristik inilah yang membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang luput dari perhatian sektor politik dan swasta.¹⁰

⁸ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64-65.

⁹ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016, hlm. 51.

¹⁰ Sorni Paskah Daeli, "Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 1, Maret 2012, hlm. 57.

Sepertihalnya LSM Gempur yang orientasinya adalah mensejahterakan masyarakat Purbayasa. Dalam hal ini, LSM Gempur berusaha menjadi wadah aspirasi pemenuhan hak bagi masyarakat desa Purbayasa terkait dengan adanya pabrik kayu CV. Purbayasa yang keberadaannya menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat desa Purbayasa. Walaupun keberadaan pabrik tersebut jelas ada sisi positifnya, yakni menjadi ladang pekerjaan ditempat tersebut, tapi dampak negatifnya juga besar bagi masyarakat desa Purbayasa, antara lain faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Berangkat dari sinilah LSM Gempur lahir dengan harapan yang besar, agar hak-hak masyarakat desa Purbayasa bisa terpenuhi dan tersalurkan dengan baik.¹¹

Untuk memaksimalkan integritas mereka, LSM berusaha memperjuangkan tujuan-tujuannya. Berikut adalah tujuan LSM:

1. Sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat.
2. Sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan.
4. Sebagai organisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan.

Seperti LSM Gempur yang terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terus mendapatkan haknya. Bukan hanya dari segi ekonominya saja,

¹¹ Observasi kedua Pada Tanggal 25 desember 2019 di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Jam 17.00.

tetapi faktor lingkungan, sosial dan kesehatan juga menjadi perhatian yang besar dalam hal ini. Inilah yang menjadi ketertarikan peneliti ingin meneliti LSM Gempur, karena LSM ini sifatnya lokal, hanya masyarakat Desa Purbayasa yang boleh menjadi anggota dari LSM tersebut. LSM Gempur berusaha menjadi perantara pembelaan hak masyarakat Desa Purbayasa atas keberadaan CV. Purbayasa.

Dalam kajian fikih siyasah, kajiannya meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dan itu diatur dalam berbagai bidang kehidupan.¹² Seperti dalam *fiqh siyasah dusturiyah* dan *fiqh siyasah dauliyah*, di dalam *fiqh siyasah maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah maliyah* ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.¹³

Dalam prinsip Fiqh Siyasah terdapat kaidah yang berbunyi:

دَفْعُ الْمَفَا سِدِّ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan, dan meraih kemaslahatan

Di dalam islam, pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat tidak dipisahkan satu sama lain, karena segala usaha di dunia harus di

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45-46.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 276.

dasarkan kepada *mardlotillah*. Bahkan usaha-usaha di dunia harus terarah menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. Akibat dari alam dan harta ini milik Allah adalah:

- a. Tidak boleh seorangpun menjadi pemilik mutlak, tanpa dibatasi oleh hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun dengan hak orang, seperti zakat, infak, tetapi juga jangan boros.
- b. Masyarakat dengan melalui wakilnya dapat mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarah kepada kemakmuran bersama.
- c. Masyarakat dapat mengambil harta perorangan apabila kemaslahatan umum menghendaknya dengan syarat pemiliknya mendapat penggantian wajar.¹⁴

Dari dasar-dasar tersebut diatas, jelaslah bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi, dan hak-hak individu di dalam hartanya juga di jamin. Apabila ada yang harus dikorbankan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, maka harus didahulukan kemaslahatan umum, sesuai dengan kaidah:

IAIN PURWOKERTO

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.

Berkaitan dengan ini al-Syathibi menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ أَمَّا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَالَمِ وَالْآجَلِ مَعًا

Sesungguhnya Syari' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 180-184.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqashid al-Syariah* adalah kemaslahatan umat. Penekanan inti *Maqashid al-Syariah* yang dilakukan oleh al-Syathibi secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan.¹⁵ Berdasarkan hal di atas, maka *siyasah* yang tepat adalah *siyasah* yang '*adilah*', yaitu *siyasah* yang kebijakan dan pengaturan yang dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat sesuai dengan dalil-dalil *kulliy*, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.¹⁶

Begitupula dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Purbayasa ini, yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat desa Purbayasa. Terlaksananya peran LSM Gempur di desa Purbayasa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa, tentu saja tidak terlepas dari peran masyarakat desa Purbayasa sendiri untuk ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan pemaparan di atas, alasan penulis memilih penelitian di desa Purbayasa karena desa Purbayasa termasuk salah satu desa yang memiliki potensi yang besar untuk sejahtera.

Seperti dalam beberapa tahun terakhir desa Purbayasa mejadi juara pertama pada tingkat Kabupaten dalam lomba kebersihan desa. Tapi hal tersebut tidak seimbang apabila tidak adanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak CV. Purbayasa, pihak pabrik juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Selama ini salah satu yang

¹⁵ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, Agustus 2017, hlm. 549.

¹⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, III : 44.

dikeluhkan oleh masyarakat adalah pembuangan limbah sembarangan ke sungai.¹⁷ Disinilah peran LSM Gempur berupaya menjadi wadah bagi masyarakat desa Purbayasa untuk menyerukan aspirasinya dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Purbayasa.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA PADAMARA PURBALINGGA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”.

B. Definisi Oprasional

Maksud dari definisi oprasional sendiri yaitu menegaskan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Peran sendiri berarti melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Sedangkan LSM sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan LSM Gempur merupakan salah satu LSM di Kabupaten Purbalingga yang menampung, memproses, mengelola, dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan umum, yang kerap kali kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan adanya CV. Purbayasa yang masih sewenang-wenang dalam membuang limbah, ketidaksetaraan

¹⁷ Observasi Awal Pada Tanggal 5 Agustus 2019 di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Jam 18.30.

terkait dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan jaminan kesehatan kepada setiap karyawannya di desa tersebut. LSM Gempur juga berusaha memberdayakan masyarakat desa Purbayasa lewat visi misinya dan juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari CV. Purbayasa.

Jadi, maksud berdirinya LSM Gempur disini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang belum tercapai oleh masyarakat desa Purbayasa. Maksud dari yang belum tercapai disini adalah kurang terjaminnya sarana kesehatan, ekonomi, dan kebersihan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat desa Purbayasa sendiri. Kesejahteraan bukan hanya menyoal tentang ekonomi yang baik, tapi juga mempunyai tubuh yang sehat, ketenangan batin dan juga lingkungan yang bersih. Upaya LSM Gempur untuk meningkatkan taraf hidup di desa Purbayasa merupakan cita-cita bersama untuk mewujudkan Purbayasa yang lebih maju dan mandiri.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terkait Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana Peran LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa Kabupaten Purbalingga dalam upaya membangun kesejahteraan umum di desa Purbayasa Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah Maliyah atau belum.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi keilmuan Fiqh Siyasah terkait dengan perkembangan konsep mengenai kesejahteraan umum, khususnya mengenai peran LSM yang ditinjau dari fiqh siyasah maliyah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini akan menjadi pembelajaran untuk bekal keilmuan peneliti di masa yang akan datang.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Purbalingga, memberikan gambaran dan evaluasi mengenai peran lembaga swadaya masyarakat.
- c. Bagi LSM, diharapkan diharapkan dapat menjadi Pembelajaran agar dapat menerapkan prinsip-prinsipnya sesuai dengan fiqh siyasah maliyah.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran yang berkaitan dengan LSM.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, juga untuk mengemukakan teori-teori yang lebih relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai kesejahteraan umum, hasil dari penelusuran pustaka-pustaka tersebut antara lain:

Skripsi dari Achad Azif Nuzul yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hysteria Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat Di Kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinatan, Kota Semarang” dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Semarang tahun 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, LSM Hysteria berusaha mengembangkan budaya kearifan lokal secara tidak langsung di sektor ekonomi lokal budaya. Pengembangan ekonomi lokal budaya Gebyuran Bustaman ini sebagai pengembangan ekonomi melalui pelestarian budaya kampung Bustaman yang tetap mempertahankan rutinitas adat istiadat.

Akan tetapi dalam hal kemandirian pengelolaan potensi kearifan lokal masyarakat kampung Bustaman masih belum berhasil, karena masih ketergantungan oleh event yang digelar LSM Hysteria.¹⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Achad Azif Nuzul dengan penelitian yang dilakukan

¹⁸ Achad Azif Nuzul, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hysteria dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat di Kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinatan, Kota Semarang”, *Skripsi*, (Fakultas Ekinomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 137-138.

peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang kesejahteraan umum. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Achad Azif Nuzul dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian Achad Azif Nuzul itu meneliti tentang pengembangan ekonomi dengan berusaha mengembangkan budaya kearifan lokal atau adat istiadat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti itu meneliti tentang kesejahteraan umum yang ditinjau dari fiqh siyasah maliyah.

Skripsi dari Darma Pranata yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat (Studi Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)” dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penelitian ini berkaitan dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat, atau yang merupakan sebuah kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial agar mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya bidang ekonomi.

LPM adalah lembaga Pemerintah Desa yang berkomitmen melaksanakan program untuk menunjang dan mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat guna meningkatkan taraf perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM sudah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan sasaran, tujuan dan manfaat. Dengan melaksanakan kegiatan pembangunan jalan Onderlagh, pengembangan Koperasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pelatihan

Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁹ Persamaan penelitian dari Darma Pranata dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengenai kesejahteraan umum. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Darma Pranata yaitu penelitian yang dilakukan peneliti akan meneliti tentang tentang kesejahteraan umum yang ditinjau dari fiqh siyasah maliyah, sedangkan penelitian Darma Pranata yaitu tentang kesejahteraan umum khususnya bidang ekonomi.

Skripsi dari Emmil Rachmaditia yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir (Studi pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala sebagai pendamping dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Desa Gebang yang meliputi peran fasilitatif, peran edukasi, peran perwakilan dan peran teknis.²⁰

¹⁹ Darma Pranata, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Studi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Lampung Timur”, *Skripsi*, (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018), hlm. iii.

²⁰ Emmil Rachmaditia, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Wilayah Pesisir Studi Pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), hlm. 82.

Persamaan penelitian dari Emmil Rachmaditia dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengenai kesejahteraan umum. Sedangkan perbedaan penelitian dari Emmil Rachmaditia dengan penelitian dari peneliti yaitu, penelitian yang dilakukan peneliti akan meneliti tentang kesejahteraan umum yang ditinjau dari fiqh siyasah maliyah, sedangkan penelitian Emmil Racmhaditia tentang kesejahteraan secara umum yang dilakukan di wilayah pesisir.

G. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yaitu penyusunan kerangka teoritik yang akan digunakan sebagai petunjuk, pedoman atau kompas dalam membedah dan menganalisis fenomena dan dalam melakukan penelitian selanjutnya.²¹ Menurut Snelbrecker mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²² Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti. Untuk memudahkan peneliti, maka peneliti ingin memaparkan beberapa teori mengenai penenelitian yang peneliti teliti, antara lain yaitu:

²¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 309.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 34-35.

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²³ Menurut Gross, Masson, dan Mc Eachem mendefinisikan peranan yang dikutip oleh David Berry dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, peranan diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya mewajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan pribadi, di dalam keluarga dan didalam peranan-peranan lainnya.

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

- a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki dari si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.²⁴

²³ Achad Azif Nuzul, *Peran Lembaga*, hlm. 46.

²⁴ David Barry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 106.

2. Teori Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik. Dalam hal ini fokus kinerja LSM adalah melakukan perubahan sosial dengan menciptakan kesadaran masyarakat melalui penataan organisasi dan metode secara bersama-sama. LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Dari penjelasan diatas, maka fungsi LSM antara lain yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan disegala bidang.
- b. Menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif.
- c. Mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, baik yang berada dikota maupun Desa/ Kelurahan/sebutan lain yang setingkat, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
- e. Memperkuat potensi masyarakat untuk gotong royong dalam aksi sosial dan penanggulangan bencana.²⁶

²⁵ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, "Peran Organisasi", hlm. 52-53.

²⁶ Darma Pranata, Peran Lembaga, hlm. 14-15.

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.²⁷

Selain itu banyak juga pendapat dari para tokoh mengenai arti dari kesejahteraan, yaitu:

- a. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- b. Dalam ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- c. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

²⁷ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2, November 2012, hlm. 2.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

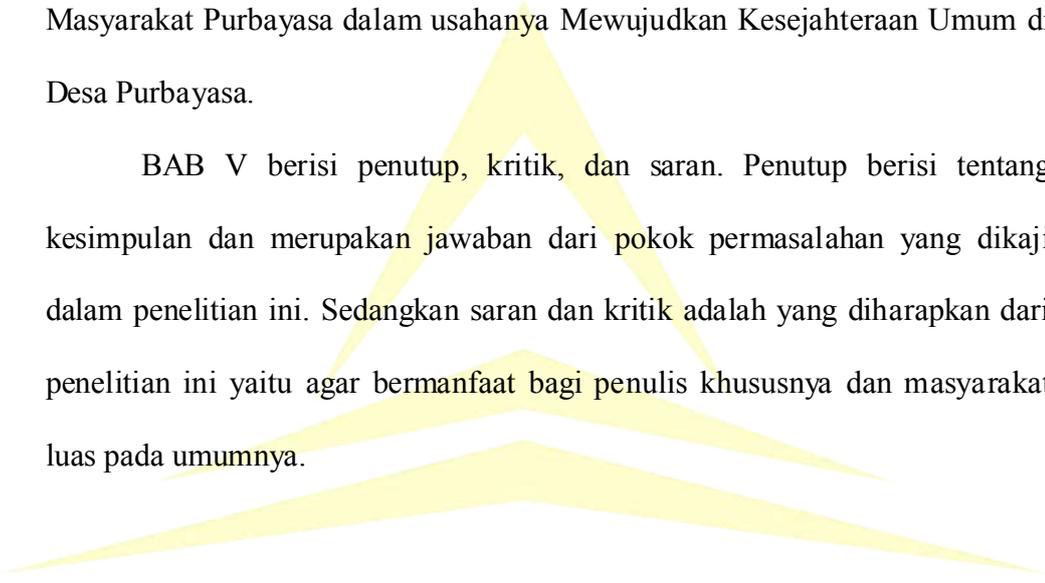
BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian, yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian, yaitu manfaat apa yang akan di timbulkan dari penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan dalam menganalisis data. Ketujuh, sistematika penulisan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian. Langkah-langkah ini disusun agar mudah dalam penyusunannya oleh peneliti.

BAB II memuat landasan teori, yang didalamnya mengolaborasikan mengenai peran LSM yang ditinjau prspektif siyasah maliyah untuk mejadi landasan teori dan pijakan dalam menganalisis masalah pada skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang peran LSM dalam mewujudkan kesejahteraan umum, kemudian membahas siyasah maliyah.

BAB III memuat jenis penelitian apa yang digunakan, tempat dilakukannya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Semua ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV menguraikan analisa dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu tinjauan siyasah maliyah yang akan mengkaji objek penelitian Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Purbayasa dalam usahanya Mewujudkan Kesejahteraan Umum di Desa Purbayasa.

BAB V berisi penutup, kritik, dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa dari uraian secara seksama tentang peran LSM Gempur, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran LSM Gempur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sekaligus sebagai wadah aspirasi program-program di berbagai bidang dapat dikatakan sudah cukup baik. Menurut masyarakat sekitar, peran LSM Gempur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah memberikan perubahan. Adanya keterbukaan antara anggota LSM dengan masyarakat membuat mereka mempercayai aspek terjang yang dilakukan LSM Gempur dalam menangani aspirasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan LSM Gempur dibidang kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketenagakerjaan.
2. Kesejahteraan dalam kajian siyasah maliyah memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan bukan hanya menyoal tentang ekonomi, tetapi juga kesehatan, lingkungan dan pekerjaan yang terjamin. Dalam pelaksanaan kinerja sebagai upaya mensejahterakan masyarakat Purbayasa, LSM Gempur dinilai sudah cukup bagus, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai keadilan dan menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat yang bisa menyuarakan hak dan untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada LSM Gempur bahwasanya dalam mewujudkan kesejahteraan umum, tidak hanya dibidang kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketenagakerjaan saja, tetapi juga lebih meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan dalam bidang pendidikan keagamaan, khususnya untuk kaum remaja agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi dan berpegang teguh pada ketaqwaan terhadap Alloh SWT.
2. Kepada masyarakat hendaknya bisa terus berkontribusi terhadap program-program yang nantinya dilaksanakan LSM Gempur. Jangan hanya ingin menikmati hasil yang ingin dicapainya saja. Karena bagaimanapun, program yang dilaksanakan LSM Gempur semua masyarakat kembali yang akan menikmatinya.
3. Kepada pemerintah desa diharapkan bisa lebih merangkul lagi kepada LSM Gempur, karena LSM Gempur mempunyai tujuan yang sama baiknya seperti pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan di desa Purbayasa yang tentu dengan porsi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Anonim. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Profinsi Jawa Tengah*. t.k: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016.
- Asyari'. "Keuangan Negara dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara)". *Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, 2.
- Barry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Chandra, Ujang. "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. XXXII, no. 1, 2015, 1-2.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Daeli, Sorni Paskah. "Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat". *Jurnal Bina Praja*. Vol. 4, No. 1, 2012, 57.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Rev, Ed). Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, *Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2018.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. V, no.1, 2015, 16.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- H.I, A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Herdiansyah, A.G. dan Randi. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) dalam Menopang Pembangunan di

- Indonesia". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 1, No. 1, 2016, 51.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN MALIKI Press, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2018.
- Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Akademika*. Vol. 20, no. 02, 2015, 245-246.
- Mahardika, Friska." Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- Mahyudi, Dedi. "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam". *Jurnal Ihyaul 'Arobiyyah*, 2016.
- al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2000.
- Mina, Risno. "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. IX, no. 2, 2016, 1.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev, Ed). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No. 3, 2017, 549.
- Nailufarh, Qurratul A'yun. "Kesejahteraan Ekonomi Rakyat di Antara Harapan dan Realitas". *Balance Economics, Bussiness, Management And Accounting Journal*. Vol. VII, no. 12, 2010, 28.
- Narbuko, dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, S, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah CIVIS*. Vol. 1, No. 2, 2011, 88.

- Nuzul, Achad Azif. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hysteria dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat di Kampung Bustaman Kelurahan Purwodinatan Kota Semarang". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Pranata, Darma. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Studi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Lampung Timur". *Skripsi*. Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.
- Rachmaditia, Emmil. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Wilayah Pesisir Studi Pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Ridlo, Ali. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 6, no 2, 2013, 5-6.
- Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". *Jurnal Geografi*. Vol. IX, no. 1, 2017, 57-58.
- Sari, Devani Ariestha. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandarlampung". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016.
- Shaifudin, Arif. "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hlm. 3.
- Sidmag, Mohammad Al Jose. "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2015, 381.
- Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 3, 2010, 390.

- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sulistyo, M. Yusuf Eko. “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Studi Kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Suradi. “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Informasi*. Vol. XVII, no. 03, 2012, 148.
- Suryono, Agus. “Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. VI, no. 2, 2014, 10.
- Trisnawati, Oktaria. “Aktualisasi Tata Kelola Good Governance LSM Pattiro Kajian dalam Isu Pencegahan Korupsi di Kota Semarang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Widyastuti, Astriana. “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”. *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 1, No. 2, 2012, 2.
- Yusdianto. “Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-Undang Keormasan”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2, 2012, 3.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

IAIN PURWOKERTO